

PRAKSIS PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA DIANTARA MAZAB JOHN DEWEY DAN CHARLES PROSSER

Dr. Putu Sudira, M.P.

Sekretaris Prodi S2-S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan PPs UNY

ABSTRAK

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengkaji pengaruh pemikiran-pemikiran dua tokoh pendidikan terkemuka dunia yaitu John Dewey dan Charles Prosser terhadap praksis pendidikan kejuruan di Indonesia. Praksis pendidikan kejuruan di Indonesia cenderung menggunakan filosofis esensialisme yang mendorong efisiensi sosial dengan ciri pokok adanya pemisahan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik. Praksis pendidikan kejuruan di Indonesia lebih kuat dipengaruhi oleh pemikiran dan teori dari Charles Prosser. Penataan standar isi program, standar sarana-prasarana sekolah, standar proses, standar penilaian, penguatan kerjasama, program praktik kerja industri, pembinaan tenaga pendidik semuanya mengarah kepada pemenuhan standar kerja di Industri, mengarah sebagai replika industri dengan terus memperlengkapi alat dan mesin seperti yang digunakan di industri. Penyelenggaraan pembelajaran teori dan praktik juga mengarah pada pengetahuan spesifik, fungsional, pengembangan skill reproduktif, trampil secara fisik sebagai persiapan bekerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang unik sekaligus universal. Sebagai pendidikan yang unik pendidikan kejuruan kedepan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan, permasalahan, harapan, dan tantangan masyarakat Indonesia melebihi kebutuhan efisiensi sosial sebagaimana harapan John Dewey.

Kata kunci: pendidikan kejuruan, esensialisme, pragmatisme

A. PENDAHULUAN

Dua tokoh pendidikan terkemuka dunia yaitu John Dewey dan Charles Prosser sangat mewarnai dasar-dasar pemikiran dan reformasi praksis pendidikan kejuruan di seluruh dunia. Kedua tokoh pendidikan ini sama-sama setuju bahwa pendidikan di sekolah kejuruan harus mencerdaskan dan semakin meningkat relevansinya dengan realitas kebutuhan ekonomi dan sosial, bahkan kebutuhan budaya, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, politik, dan ideologi bangsa. Kendati kedua tokoh ini sama-sama sepakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial, namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda akan hal tersebut (Rojewski, 2009; Dow, 2002).

Prosser yang banyak dikenal sebagai bapak vokasi dunia dengan teorema enam belas memandang pendidikan kejuruan di sekolah kejuruan harus diorganisir sebagai masyarakat industri dan harus selalu belajar dari industri. Menurut Rojewski (2009) pandangan Prosser lebih kearah efisiensi sosial, bukan untuk pemenuhan kebutuhan diri individu masyarakat, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja suatu negara. Benteng pertahanan pendidikan kejuruan untuk efisiensi sosial adalah penyiapan tenaga kerja terdidik-terlatih yang selalu tunduk kepada pemberi kerja. Menurut pandangan Prosser, efisiensi sosial sekolah kejuruan dikatakan efektif hanya jika sekolah kejuruan tersebut dapat menunjukkan iklim sekolah sama dengan iklim di industri, pihak user dan alumni puas terhadap hasil pendidikannya, siap mencetak tenaga kerja yang trampil memenuhi kebutuhan pekerjaan di suatu negara.

Berbeda dengan pandangan Prosser, Dewey meyakini bahwa tujuan dasar pendidikan kejuruan adalah untuk pemenuhan kebutuhan individu dan penyiapan menjalani kehidupan. Bagaimana siswa belajar memecahkan permasalahan hidupnya dengan cara-cara berbeda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dewey menawarkan model pendidikan kejuruan demokratis dimana siswa memiliki kebebasan mengembangkan kemampuan intelektualitas serta kesempatannya dalam mengembangkan kompetensi kerja di industri. Dewey menolak kesan bahwa peserta didik adalah individu yang pasif yang dikendalikan oleh tekanan ekonomi pasar dimana eksistensi dan kapasitas intelektualnya diharamkan (Rojewski, 2009:21).

Kedua mazab ini sangat menarik dikaji. Apa pengaruh kedua mazab ini terhadap perumusan definisi dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia. Demikian juga pengaruh-pengaruhnya terhadap penataan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan kejuruan di Indonesia. Paper ini membahas praksis pendidikan kejuruan Indonesia dari aspek filosofis, yuridis, teoritis, dan praktis.

B. ASPEK FILOSOFIS PENDIDIKAN KEJURUAN

Mula-mula pendidikan kejuruan didasarkan atas filosofi esensialisme dimana pendidikan kejuruan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Ciri pokok dari filosofi ini adalah adanya pemisahan diantara pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik, kurikulum pendidikan diorganisasikan secara sekuensial,

instruktur membutuhkan pengalaman yang ekstensif dalam dunia bisnis dan terkait erat dengan industri (Rojewski, 2009:22). Esensi pendidikan kejuruan mendidik manusia bernilai guna, bermakna bagi kehidupan, kompeten, menekankan peran dan fungsi pendidik atau pelatih dalam proses pembelajaran, sebagai ahli yang menguasai subyek materi, mampu mengembangkan skill melalui berbagai pelatihan, pengulangan, pengkondisian, dan pengembangan kebiasaan baik perilaku peserta didik. Pembelajaran peserta didik dilakukan secara progresif dari skill yang kurang kompleks ke skill yang lebih kompleks (Sudira, 2012:18).

Belakangan pendidikan kejuruan semakin dipengaruhi oleh filosofi pragmatisme. Ciri pokok dari filosofi pragmatisme adalah adanya penekanan kepada pemecahan masalah dan berpikir orde tinggi, belajar dikonstruksikan dari pengetahuan sebelumnya. Tujuan pendidikannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan individu dan dirinya sendiri dalam menjalani kehidupan.

Pragmatisme merupakan filosofi bertindak, mempertanyakan bagaimana konsekuensi praktisnya dalam hidup manusia. Kaitannya dengan dunia pendidikan kejuruan, kaum pragmatisme menghendaki pembagian persoalan teoritis dan praktis. Pengembangan teori memberi bekal etik dan normatif, sedangkan praktik mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasi teori dan praktis itu penting agar pendidikan tidak melahirkan materialisme terselubung ketika terlalu menekankan pada hal praktis. Juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis masyarakat, sebab kalau demikian yang terjadi berarti pendidikan dapat dikatakan disfungsi (Sudira, 2012:20).

Pemikiran Prosser cenderung masuk dalam aliran filosofi esensialisme sedangkan pemikiran Dewey cenderung masuk dalam aliran filosofi pragmatisme. Pragmatisme dalam tahun-tahun terakhir diidentifikasi sebagai filosofi pendidikan vokasi yang paling utama (Rauner, F., 2009; Huisinga, R., 2009). Pendidikan pragmatis mencoba menyiapkan peserta memecahkan masalah-masalah nyata secara logis dan rasional, terbuka mencari dan menemukan alternatif-alternatif solusi serta siap melakukan eksperimen. Outcome yang diharapkan dari pendidikan pragmatis adalah masyarakat berpengetahuan yang secara vokasional mampu beradaptasi, mampu mencukupi dirinya sendiri, berpartisipasi dalam masyarakat

demokrasi, dan berpandangan bahwa belajar dan beraksi adalah proses yang panjang (Lerwick, dalam Rojewski.J.W., 2009).

Menurut Sudira (2012) pragmatisme mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Miller menyatakan pendidik pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mempraktikkan dan mempertahankan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai referensi dan dasar praktik pendidikan di tempat kerja (workplace education). Pragmatisme menyatakan bahwa diantara pendidik dan peserta didik bersama-sama melakukan learning process (Heinz, W.R., 2009; Deitmer, L., Heinemann, L., 2009), menekankan kepada kenyataan atau situasi dunia nyata, konteks dan pengalaman menjadi bagian sangat penting, pendidik yang progresif kaya akan ide-ide baru.

Kaum pragmatis adalah manusia-manusia empiris yang sanggup bertindak, tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan secara nyata berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan yang konkrit. Menurut Tilaar (2002:184) pragmatisme melihat nilai pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya didalam praktik. Karenanya, teori bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandeg dalam teori itu sendiri. Teori yang tepat adalah teori yang berguna, siap pakai, dan dalam kenyataannya berlaku serta memungkinkan manusia bertindak secara praktis. Kebenaran suatu teori, ide atau keyakinan bukan didasarkan pada pembuktian abstrak, melainkan didasarkan pada pengalaman, pada konsekuensi praktisnya, dan pada kegunaan serta kepuasan yang dibawanya. Pendeknya, ia mampu mengarahkan manusia kepada fakta atau realitas yang dinyatakan dalam teori tersebut (Sudira 2012).

C. DEFINISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA

Secara yuridis definisi dasar pendidikan kejuruan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003. Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang utamanya menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Pasal ini juga

memberi pemaknaan bahwa lulusan pendidikan kejuruan tidak harus bekerja tetapi bisa meneruskan ke pendidikan tinggi berikut. Pasal ini tidak menegaskan tuntutan kompetensi, muatan, dan cara-cara bagaimana pendidikan kejuruan di Indonesia dilaksanakan.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. SKL ini mengandung empat aspek pokok, yaitu: (1) meningkatnya kecerdasan dan pengetahuan sebagai bagian aspek pendidikan otak; (2) dimilikinya kepribadian dan ahklak mulia sebagai personifikasi dari pendidikan hati nurani; (3) dimilikinya ketrampilan agar dapat menghidupi dirinya secara mandiri; (4) dapat menempuh studi lanjut sesuai bidang kejuruan yang telah diambil.

Definisi pendidikan kejuruan kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah (PP) 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pasal 157 ayat 2 menyatakan satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Definisi dan tujuan pendidikan kejuruan dalam UU no. 20 Tahun 2003 lebih mengesankan pengaruh mazab Prosser dengan filosofinya esensialisme. Sedangkan dalam PP 19 Tahun 2005 deskripsi SKL SMK lebih kuat menunjukkan pengaruh mazab Dewey dengan filosofinya pragmatisme. Secara yuridis formal pendidikan

kejuruan di Indonesia diselenggarakan di SMK dan MAK. Sejalan dengan otonomi daerah pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK dan MAK diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal baik dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, penguatan dan konservasi budaya dan tata nilai.

D. PENDIDIKAN KEJURUAN MAZAB CHARLES PROSSER

Prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan pendidikan kejuruan diletakkan oleh Charles Prosser pada tahun 1925 sebagai teori pendidikan kejuruan/vokasi yang paling banyak digunakan. Teori Prosser dikenal dengan "PROSSER'S SIXTEEN THEOREMS". Teori ini menyatakan 16 hal pokok dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pendidikan dunia kerja. Prosser adalah tokoh pendidikan kejuruan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Ke 16 teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is a replica of the environment in which he must subsequently work. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti bekerja. Teori ini terkait dengan lingkungan bekerja (work environment).
2. Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation itself. Pelatihan kejuruan akan efektif hanya jika tugas-tugas diklat pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama, operasi yang sama, alat, dan mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Teori ini terkait dengan kebutuhan standar industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
3. Vocational education will be effective in proportion as it trains the individual directly and specifically in the thinking habits and the manipulative habits required in the occupation itself. Pendidikan kejuruan akan efektif jika secara langsung dan secara khusus melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti dipersyaratkan di dalam pekerjaan itu sendiri. Teori ini berkaitan dengan kebiasaan kerja (work habits).
4. Vocational education will be effective in proportion as it enables each individual to capitalize on his interests, aptitudes, and intrinsic intelligence to the highest degree. Pendidikan kejuruan akan menjadi efektif jika setiap individu memodali minatnya, bakatnya, kecerdasannya pada tingkat yang paling tinggi. Teori ini berkaitan dengan kebutuhan individu (individual need).

5. Effective vocational education for any profession, trade, occupation, or job can only be given to the selected group of individuals who need it, want it, and are able to profit by it. Pendidikan kejuruan efektif untuk setiap profesi, keterampilan, jabatan, pekerjaan hanya untuk setiap orang yang membutuhkan, menginginkan dan dapat memberi keuntungan. Teori ini bersifat pilihan (elective).
6. Vocational training will be effective in proportion as the specific training experiences for forming right habits of doing and thinking are repeated to the point that these habits become fixed to the degree necessary for gainful employment. Pelatihan kejuruan akan efektif jika pengalaman-pengalaman diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang sehingga sesuai atau cocok dengan pekerjaan. Teori gainful employment.
7. Vocational education will be effective in proportion as the instructor has had successful experiences in the application of skills and knowledge to the operations and processes he undertakes to teach. Pendidikan kejuruan akan efektif jika guru/instrukturnya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan skill dan pengetahuan (kompetensi) pada operasi dan proses kerja yang telah dilakukan. Teori craftsperson teacher (sosok guru yang trampil).
8. For every occupation there is a minimum of productive ability which an individual must possess in order to secure or retain employment in that occupation. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut. Teori performance standards (standar unjuk kerja).
9. Vocational education must recognize conditions as they are and must train individuals to meet the demands of the "market" even though it may be true that more efficient ways for conducting the occupation may be known and better working conditions are highly desirable. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar atau tanda-tanda pasar dalam melatih setiap individu. Teori industry needs.
10. The effective establishment of process habits in any learner will be secured in proportion as the training is given on actual jobs and not on exercises or pseudo jobs. Pembiasaan efektif pada peserta didik tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata sarat nilai. Teori actual jobs.
11. The only reliable source of content for specific training in an occupation is in the experiences of masters of that occupation. Isi diklat khusus dalam sebuah pekerjaan merupakan okupasi pengalaman para ahli. Teori content from occupation.
12. For every occupation there is a body of content which is peculiar to that occupation and which practically has no functioning value in any other occupation. Untuk setiap okupasi atau pekerjaan terdapat ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Teori specific job training.
13. Vocational education will render efficient social services in proportion as it meets the specific training needs of any group at the time that they need it and in such a way that they can most effectively profit by the instruction. Pendidikan

kejuruan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan sekelompok orang yang pada saatnya memang memerlukan dan memang paling efektif dilakukan lewat pengajaran kejuruan. Teori group needs.

14. Vocational education will be socially efficient in proportion as in its methods of instruction and its personal relations with learners it takes into consideration the particular characteristics of any particular group which it serves. Pendidikan kejuruan secara sosial akan efisien jika metoda pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik.
15. The administration of vocational education will be efficient in proportion as it is elastic and fluid rather than rigid and standardized. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar.
16. While every reasonable effort should be made to reduce per capita cost, there is a minimum level below which effective vocational education cannot be given, and if the course does not permit this minimum of per capita cost, vocational education should not be attempted. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

Teori Prosser sangat kuat pengaruhnya pada pendidikan dan pelatihan kejuruan di berbagai negara. Taiwan menggunakan sistem simulasi, dimana bengkel praktik kerja dibangun di sekolah kejuruan seperti atau sama dengan pasilitas industri. Yang kedua dengan on-the-job training dimana tempat kerja juga untuk pengajaran. Demikian juga dengan Jerman yang menggunakan dual system, TAFE di Australia menerapkan work-plce-learning untuk mendekatkan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja.

E. PENDIDIKAN KEJURUAN MAZAB JOHN DEWEY

Pendidikan kejuruan dalam mazab John Dewey meletakkan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk menyiapkan siswa berkemampuan memecahkan permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan cara-cara berlogika dan bernalar menggunakan pikiran terbuka dalam mencari berbagai alternatif solusi dengan selalu siap sedia melakukan berbagai percobaan/eksperimen. Dampak dari pendidikan dalam mazab Dewey adalah warga negara yang berpengetahuan yang secara vokasi mampu beradaptasi dan mencukupi dirinya berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, memiliki wawasan belajar dan bertindak mengatasi perubahan sebagai proses belajar sepanjang hayat (Rojewski, 2009). Dewey juga menawarkan pandangan bahwa pendidikan kejuruan seharusnya memberi solusi-solusi masalah diskriminasi dalam perekrutan tenaga

kerja, kebekuan kaum perempuan, kaum minoritas, kaum terbelakang, dan kaum miskin.

Dewey menganjurkan adanya modernisasi kurikulum pendidikan kejuruan dengan memasukkan studi "scientific-technical". Dewey berargumen bahwa persekolahan tradisional telah menjadi tumpul dan mekanistik. Sebagai pendidik yang progresif harus melakukan perubahan kurikulum dan pembelajaran yang mencerminkan perubahan teknologi secara nyata di abad baru. Dalam pendidikan demokratis, peserta didik mengeksplorasi kapasitas dirinya dengan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakatnya. Dewey memandang sekolah yang terisolasi dari kehidupan masyarakat penuh pemborosan. Dewey memandang bahwa sekolah harus mampu melakukan transmisi dan transformasi budaya dengan semakin hilangnya perbedaan posisi ras, suku, dan kedudukan sosial ekonomi mereka. Setiap individu peserta didik diharapkan memiliki pandangan positif untuk saling membantu.

Sekolah terbaik adalah sekolah yang mampu membuat komunitas sosial yang mengajak semua warganya mengembangkan budaya anggota masyarakatnya. Menurut Dewey hanya pengalaman sejati dan asli yang memungkinkan peserta didik mengembangkan teori-teori melalui proses menghubungkan berbagai kejadian atau peristiwa. Peserta didik bersama-sama pendidik harus melakukan upaya-upaya riset bersama lalu melakukan proses berpikir reflektif. Menurut Dow (2002), Dewey mengusulkan pendekatan semivokasional, dengan keyakinan semua peserta didik butuh mengembangkan kecerdasan industrial agar dapat berpartisipasi penuh dan bebas ditengah-tengah aliran demokrasi industrial.

F. PRAKSIS PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA

Praxis pendidikan kejuruan di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh mazhab Prosser. Sistem pendidikan di Indonesia membagi pendidikan kejuruan secara terpisah dengan pendidikan akademik. Pendidikan kejuruan di tingkat menengah diselenggarakan di SMK dan MAK sedangkan pendidikan akademik diselenggarakan di SMA dan MA. Pemisahan pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik merupakan ciri pokok dari pendidikan dengan aliran filosofi esensialisme.

Praxis pendidikan kejuruan di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh mazab Prosser karena pendidikan kejuruan dilaksanakan secara terpisah di SMK dan MAK. Perkembangan pembinaan pendidikan kejuruan di SMK melalui direktorat Pembinaan SMK (Dit PSMK) juga menunjukkan kuatnya pengaruh mazab Prosser. Penataan standar isi program, standar sarana-prasarana sekolah, standar proses, standar penilaian, penguatan kerjasama, program praktik kerja industri, pembinaan tenaga pendidik semuanya mengarah kepada pemenuhan standar kerja di Industri, mengarah sebagai replika industri dengan terus memperlengkapi alat dan mesin seperti yang digunakan di industri. Penyelenggaraan pembelajaran teori dan praktik juga mengarah pada pengetahuan spesifik, fungsional, pengembangan skill reproduktif, trampil secara fisik sebagai persiapan bekerja.

Struktur kurikulum pendidikan kejuruan sebelum Kurikulum Tahun 2013 mengenal pengelompokan program normatif, adaptif, dan produktif. Sesungguhnya pengelompokan ini mengandung makna pragmatis dimana pendidikan kejuruan seharusnya selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan dan secara normatif lulusannya memiliki kompetensi moral dan attitude yang baik. Sayangnya pengelompokan ini dimaknai sebagai kapling kelompok guru dalam memperoleh jumlah jam mengajar setelah diberlakukannya beban guru bersertifikat.

Pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja sangat penting fungsi dan posisinya dalam memenuhi tujuan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan suatu negara diharapkan mencakup empat hal pokok yaitu: (1) memberi peluang kerja untuk semua angkatan kerja yang membutuhkan; (2) pekerjaan tersedia seimbang dan merata di setiap daerah dan wilayah; (3) memberi penghasilan yang mencukupi sesuai dengan kelayakan hidup dalam bermasyarakat; (4) pendidikan dan latihan mampu secara penuh mengembangkan semua potensi dan masa depan setiap individu; (5) matching men and jobs dengan kerugian-kerugian minimum, pendapatan tinggi dan produktif. Kebijakan ketenakerjaan tidak boleh memihak hanya pada sekelompok atau sebagian dari masyarakatnya. Jumlah dan jenis-jenis lapangan pekerjaan tersedia, tersebar merata, seimbang, dan layak untuk kehidupan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan pendidikan kejuruan yang baik diperlukan proses vokasionalisasi. Tujuan utama vokasionalisasi adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan bimbingan kejuruan dengan perkembangan kebutuhan keduniakerjaan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang kompetitif dan berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Planet bumi ini bukan untuk satu generasi melainkan untuk anak cucu tanpa batas. Karenanya, vokasionalisasi tidak boleh terjebak hanya pada orientasi pasar yang sempit. Vokasionalisasi harus membangun masyarakat sejahtera sekarang dan masa depan tanpa batas waktu. Vokasionalisasi juga membawa visi misi membangun dan menjaga jagat raya beserta seluruh isinya menjadi "hamemayu ayuning bhawana". Dunia yang sudah "ayu" atau baik diperbaiki kembali secara terus menerus agar tambah baik. Vokasionalisasi tidak boleh terjebak pada kebutuhan sesaat yang sempit apalagi mengancam kelangsungan hidup. Ini pesan moral vokasionalisasi masyarakat melalui pendidikan vokasi dan kejuruan. Pendidikan kejuruan tidak semata mata untuk memperoleh kesenangan, kemudahan, kenyamanan, keamanan sementara, tetapi untuk tujuan yang lebih jauh yaitu bahagia dan damai hidup bersama di planet bumi ini. Disamping mengupayakan penyiapan masyarakat untuk menjadi semakin melek, mejadi tenaga kerja yang produktif, vokasionalisasi menjadi sangat potensial dalam mengembangkan masyarakat belajar dan terus berkomitmen mengembangkan efisiensi dalam berbagai bentuk pemikiran.

Ketersediaan peluang-peluang kerja secara merata merupakan bagian penting dari pengembangan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja dalam mengisi peluang-peluang kerja yang ada perlu menjalankan fungsi-fungsi dasar pendidikan kejuruan yaitu: (1) melakukan transmisi kultur (budaya); (2) transmisi skills/kemampuan; (3) transmisi nilai dan keyakinan; (4) persiapan untuk hidup produktif; (5) pemupukan interaksi kelompok; (6) pengembangan kearifan dan keunggulan lokal.

Pendidikan kejuruan di SMK sebagai pendidikan untuk pengembangan kompetensi kerja SDI akan berhasil baik jika mampu menumbuhkembangkan esensi dan eksistensi manusia melalui pendidikan kejuruan yang memasyarakat, berbudaya kompetensi dalam tatanan kehidupan berdimensi lokal, nasional, regional, dan

global. Sebagai produk masyarakat, pendidikan kejuruan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dimana pendidikan kejuruan dikembangkan. Pendidikan kejuruan tumbuh dari masyarakat, berkembang bersama budaya dan tradisi masyarakat setempat, memperhatikan kearifan lokal, keunggulan lokal, potensi wilayah, dukungan masyarakat, partisipasi dan kerjasama masyarakat, ada konsensus yang kuat diantara masyarakat dengan lembaga pendidikan kejuruan. Visi pendidikan kejuruan seharusnya kongruen dengan visi masyarakat dimana pendidikan kejuruan dikembangkan (Tilaar, 1999).

G. KESIMPULAN

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang unik sekaligus universal. Sebagai pendidikan yang unik pendidikan kejuruan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan, permasalahan, harapan, dan tantangan masyarakatnya melebihi kebutuhan efisiensi sosial sebagaimana harapan John Dewey. Penataan dan pengembangan pendidikan kejuruan saat ini masih banyak dipengaruhi oleh pandangan mazab Prosser sehingga kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir orde tinggi belum berkembang di sekolah kejuruan dengan baik. Kedepan penataan program-program pendidikan kejuruan di SMK perlu dikembangkan untuk peningkatan ketrampilan life skill dan career skill dengan penguatan pendidikan dan pelatihannya untuk berkemampuan trampil dan cerdas dalam belajar menggunakan kreativitas, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan kemampuan menggunakan media dan teknologi informasi dengan lebih baik.

REFERENSI

- Deitmer, L. & Heinemann, L. (2009). TVET and R&D Evaluation: The Potential for Optimizing TVET. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International handbook of education for the changing world of work, bridging academic and vocational learning* (pp. 1521-1534). Bon: Springer.
- Dow, J.L. (2002). *The new vocationalism: a Deweyan analysis*: Disertasi doktor, tidak diterbitkan, University of Florida, Florida.
- Gill, I.S., Fluitman, F., & Dar, A. (2000). *Vocational education and training reform, matching skills to markets and budgets*. Washington: Oxford University Press.

- Heinz .W.R (2009). Redefining the Status of Occupations. In J. A. Athanasou , R. V. Esbroeck. International Handbook of Career Guidance. Springer Science Business Media B.V.
- Huisinga, R. (2009). Approaches to designing TVET curricula. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), International handbook of education for the changing world of work, bridging academic and vocational learning (pp. 1669-1686). Bonn: Springer.
- Likoff.,L., Chambers.J., Fogarty.S. (2008). Encyclopedia of careers and vocational guidance, fourteenth edition. New York: Infobase Publishing
- Pavlova M. (2009). The vocationalization of secondary education: the relationships between vocational and technology education. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning (pp. 1805-1822). Bonn: Springer.
- Pavlova, M. & Munjanganja,L.E. (2009) Changing workplace requirements: implications for education. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning (pp. 180581-96). Bon: Springer.
- Rojewski. J.W (2009). A conceptual framework for technical and vocational education and training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning (pp. 19-40). Bonn: Springer.
- Sudira, P. (2012). Filosofi dan teori pendidikan vokasi dan kejuruan. Yogyakarta: UNY Press.
- Tessaring, M. (2009). Anticipation of skill requirements: european activities and approaches. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning (pp. 147-160). Bonn: Springer.
- Thompson, John F, (1973). Foundation of vocational education social and philosophical concepts. New Jersey: Prentice-Hall.
- Tilaar, H.A.R., (1999). Pendidikan kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., (2002). Perubahan sosial dan pendidikan, pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). Pengembangan sumberdaya manusia melalui SMK. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.
- Wagner, T. (2008). The global achievement gap. New York: Basic Books.
- Zajda,J., Biraimah K., Gaudelli W.(2008) Cultural capital: what does it offer students? a cross-national analysis. Education and Social Inequality in the Global Culture. Melbourne: Springer Science + Business Media B.V.